

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sleman saat ini sedang giat - giatnya melaksanakan Pembangunan di segala bidang agar dapat sejajar atau mungkin lebih baik dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Dengan demikian tidak mengherankan apabila berbagai gerakan pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Sleman mulai dari perbaikan jalan, trotoir, taman-taman kota sampai pembangunan universitas-universitas dan pembangunan stadion olah raga. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentu diperlukan dana yang tidak sedikit dan salah satu sumber dana tersebut adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur stabilitas ekonomi dan sebagai alat pemerataan pendapatan. Penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan kelangsungan penyelenggaraan kehidupan pemerintah. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.

Berkaitan dengan peranan yang sangat penting dari Pajak Bumi dan Bangunan, maka dinas-dinas yang terkait seperti Dirjen Pajak,

Dipenda, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se- Kabupaten Sleman telah menempuh langkah-langkah penting dalam upayanya menarik dana masyarakat. Upaya yang ditempuh yaitu melalui berbagai media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar, kemudian dengan pemasangan papan reklame atau slogan-slogan di pinggir jalan, yang kesemuanya berisi perlunya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelancaran daerah (Direktorat Jenderal Pajak, 2000).

Dalam pelaksanaan perpajakan, Wajib Pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang telah dilakukan. Oleh karena itu pelayanan perpajakan sudah selayaknya harus lebih baik sebagai komitmen prestasi atas pembayaran yang telah dilakukan. Perlu disadari bahwa permintaan pelayanan atas hak dan kewajiban perpajakan cenderung meningkat sejalan dengan kebijaksanaan perpajakan dan laju pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2000).

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat miskin yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah sampai pada para konglomerat yang mempunyai tingkat pendidikan jauh lebih tinggi dari rakyat miskin, perbedaan inilah yang membuat adanya status sosial di negara kita (Nasution, 1994).

Walaupun dinas-dinas yang terkait telah melakukan langkah-langkah yang sedemikian rupa, namun dalam kenyataannya masyarakat di Kabupaten Sleman masih ada yang mengabaikan pajaknya atau dengan kata lain kesadaran masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan

Bangunan masih cukup rendah. Menurut data di kantor pajak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sleman pada tahun 2001 sebesar Rp 9.476.143 (68,85%) sedangkan target yang dicanangkan adalah sebesar Rp 13.763.100 sehingga ada tunggakan sebesar Rp 4.286.957 (31,15%). Kemudian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2002 sebesar Rp 37.633.882 (97,36%) sedangkan target yang dicanangkan sebesar Rp 38.654.117 sehingga ada tunggakan sebesar Rp 1.020.235 (2,64%). Sedangkan penerimaan untuk tahun 2003 sebesar Rp 45.410.235 (103,22%) sedangkan target yang dicanangkan hanya sebesar Rp 43.995.065 sehingga penerimaan melebihi target yang dicanangkan sebesar Rp 1.415.170 (3,22%). Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini kiranya disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat.

Kusmiati dan Desminiarti (1990) mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi diperkirakan cenderung lebih tanggap dan mengerti tujuan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan daerah dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan merasa tidak keberatan karena cenderung lebih mengerti tujuan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan daerah.

Demikian juga dengan status ekonomi yang lebih tinggi diperkirakan cenderung lebih tanggap dan mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan seseorang yang memiliki status ekonomi yang lebih rendah. Perbedaan dalam status ekonomi akan menimbulkan perbedaan dalam menanggapi suatu hal termasuk menanggapi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (Kusmiati dan Desminiarti, 1990).

Menurut Boyd (2000) persepsi merupakan proses dengan apa seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi. Persepsi masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pendapatan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Persepsi pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan.

Selain itu hambatan atau kendala yang muncul dalam kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu seperti tidak siapnya wajib pajak ketika saat pembayaran tiba, sehingga seringkali merepotkan petugas yang harus datang berulang kali. Lebih merepotkan lagi apabila tunggakan tidak segera dilunasi, sehingga terjadi pembengkakan tunggakan pajak yang semakin memberatkan para wajib pajak sendiri. Di samping itu ada kendala yang lain, yaitu seperti sulitnya meningkatkan kesadaran di antara anggota masyarakat akan arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan daerah. Hal ini karena sebagian masyarakat masih menganggap pajak itu merupakan kewajiban saja dan tidak mengetahui apa manfaat yang diperoleh dari membayar Pajak Bumi

dan Bangunan. Akibatnya pajak dianggap sebagai sesuatu yang membebani mereka (Hersey, 1986).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut melalui skripsi ini dengan judul **“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti dapat terkonsentrasi dan dapat menghasilkan analisis yang lebih baik, maka penulisan menggunakan batasan-batasan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sidoarum dan Kelurahan Nogotirto di Kabupaten Sleman pada tahun 2003.
3. Wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah Kabupaten Sleman yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Godean di Desa Sidoarum dan Kecamatan Gamping di Desa Nogotirto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan antara persepsi pendidikan dengan persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Apakah ada hubungan antara persepsi status ekonomi dengan persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan tingkat pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi pendidikan dengan persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi status ekonomi dengan persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan tingkat pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menambah pengetahuan bagi pembaca yang berkepentingan dan bisa dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Memberikan gambaran dan menambah wawasan keilmuan dan pemahaman tentang informasi akuntansi dalam perspektif Islam.

2. Bidang Praktik

a. Bagi Dirjen Pajak

Sebagai bahan masukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sebagai tambahan koleksi bacaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian agar memperoleh gelar sarjana serta menerapkan teori-teori yang pernah ditempuh selama kuliah.